

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk bermasyarakat. Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatl timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi "*homo homini lupus*"¹.

Kejahatan dan penganiayaan terhadap Anak (KDRTA) bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Berdasarkan monitoring Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Sulawesi Selatan sejak setahun terakhir, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
1
kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹<http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penganiayaan-makalah-hk-pidana.html>. 27/2/2016

Banyak masyarakat menganggap kejahatan penganiayaan terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa.

Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.²

Banyak berita di media saat ini tengah membahas kekerasan dan penganiayaan yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia. Banyak penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Hal inilah yang menjadi perhatian pihak Kepolisian Negara Indonesia agar dapat terwujud stabilitas masyarakat. Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.

² Sulaiman Zuhdi Manik, "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga", 2007, <<http://www.KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911212313>>, [12-03-2016]

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai tindak pidana yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul ialah tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama mengenai penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiayaan hampir selalu tuntutan *subsider* setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian. Ada beberapa model dan macam penganiayaan yang telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian dan keresahan yang terus meningkat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam KUHAP Pasal 6 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³.

³Tim Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permata Press. Hal 11

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Akan tetapi, pada kenyataannya di Kabupaten Bulukumba masih saja terjadi kasus penganiayaan terhadap anak. Berdasarkan data kasus penganiayaan pada anak yang diperoleh dari Polres Bulukumba telah terjadi kasus penganiayaan anak dari tahun 2013 Sebanyak 56 Kasus yang di laporkan dan dilimpahkan sebanyak 5 kasus, tahun 2014 sebanyak 68 kasus yang di laporkan dan dilimpahkan sebanyak 5 kasus, tahun 2015 72 kasus yang dilimpahkan dan sebanyak 10 kasus yang di laporkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah kasus korban kejahatan penganiayaan pada anak pada wilayah Polres Bulukumba mengalami peningkatan, baik dari pelaporan ke pelimpahan hingga teralisasinya kasus tersebut.

Kasus penganiayaan pada anak sangat membutuhkan perhatian, oleh karena itu peran Polres Bulukumba sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus anak korban kejahatan dan penganiayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan (Studi Kasus pada Polres Bulukumba)”**.

KESIMPULAN

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecenderungan yang mengakibatkan kejahatan penganiayaan pada anak disebabkan oleh adanya permasalahan yang terjadi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dan juga disebabkan oleh adanya tindakan campur tangan orang tua, dalam permasalahan anak mereka. Selain itu akibat kelalaian Guru terhadap siswanya dan pengawasan orang tua berada dalam kecenderungan berikutnya.
2. Berdasarkan laporan yang diterima dilapangan hubungan antara korban dan pelaku ternyata merupakan teman dekat, dan ada juga beberapa kasus antara Guru dan siswa serta antara orang tua dengan anaknya. Perlakuan yang didapatkan oleh korban biasanya mengakibatkan trauma dan juga terkadang sampai menimbulkan luka memar (lebam) bagi korban.
3. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penanganan adalah kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa menguatkan perkara, sehingga proses penyelidikan dan pemeriksaan sulit dilanjutkan.
4. Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh pihak polisi dalam penaggulangan kejahatan tindak pidana kejahatan dan penganiayaan pada anak, meliputi: menerima laporan penganiayaan, melakukan pemeriksaan terhadap, korban, pelaku dan saksi-saksi serta melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan.